



Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Mita Aprilia¹

R. Rindu Garvera²

Asep Nurdin Rosihan Anwar³

Universitas Galuh¹⁻³

Alamat: Alamat: Jl. R. E. Martadinata No. 150 Ciamis

Korespondensi penulis: mitaaprilias44@gmail.com

Abstract. *This research is motivated by the persistence of poverty in rural areas, prompting the government to launch a non-cash food assistance program as a form of social assistance for underprivileged families. The purpose of this study is to determine the implementation of the non-cash food assistance program by Family Hope Facilitators in Sidaharja Village, Pamarican District, Ciamis Regency. This study used a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results indicate that the implementation of the Non-Cash Food Assistance Program by Family Hope Facilitators in Sidaharja Village, Pamarican District, Ciamis Regency has not been running optimally. This is indicated by several dimensions and indicators, particularly in the communication dimension, where there are obstacles in the provision of assistance that are not properly targeted to beneficiary families.*

Keywords: *Program Implementation, Non-Cash Food Assistance, Family Hope Facilitators.*

Abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya kemiskinan dipedesaan sehingga pemerintah mengeluarkan program bantuan pangan non tunai sebagai bentuk bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bantuan pangan non tunai oleh Pendamping Keluarga Harapan di desa sidaharja kecamatan pamarican kabupaten ciamis. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum berjalan secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya dimensi dan indikator khususnya pada dimensi komunikasi terdapat kendala pada indikator pemberian bantuan yang belum tepat sasaran kepada keluarga penerima manfaat.

Kata Kunci: Implementasi Program, Bantuan Pangan Non Tunai, Pendamping Keluarga Harapan.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

LATAR BELAKANG

Menurut Abhijit Banerjee (2002), kemiskinan memiliki banyak aspek, dan mendefinisikannya secara tepat sarat dengan kesulitan konseptual dan praktis. Akses terbatas ke pasar dan infrastruktur berkualitas hanyalah dua dari sekian banyak cara kemiskinan memengaruhi kehidupan masyarakat miskin. Menurut Bappenas (2005), seseorang dianggap hidup dalam kemiskinan jika ia tidak mampu memenuhi hak asasi manusianya untuk hidup bermartabat. Berikut ini adalah contoh hak-hak dasar:

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Salah satu prioritas utama pemerintah adalah penanggulangan kemiskinan. Intinya adalah menyediakan sarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus diri sendiri dalam hal gizi, pendidikan, dan kesehatan. Dalam jangka pendek, kita dapat berfokus pada hal-hal seperti peningkatan upah dan kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, kita harus berupaya memberdayakan individu dan masyarakat agar mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi kompetitif dan mandiri. Sesuai klaim Gordon (Mulyadi 2018:24), "implementasi melibatkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mencapai program." Dalam konteks ini, para manajer membuat keputusan tentang pengorganisasian, interpretasi, dan pengembangan kebijakan tertentu. Istilah "pengorganisasian" menggambarkan proses pengaturan sumber daya, unit, dan prosedur program. Proses menafsirkan ketentuan program menjadi rencana dan pedoman yang dapat dilaksanakan dan diterima dikenal sebagai interpretasi. Proses penerapan program melibatkan penggunaan berbagai perangkat Langkah-langkah untuk mencapai tujuan program meliputi layanan rutin, pembayaran, atau implementasi.

Membantu masyarakat memenuhi kebutuhan paling mendasar mereka adalah tujuan Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berpartisipasi dalam BPNT, sebuah program bantuan pangan non-tunai, dengan menerima pembayaran setiap bulan melalui sistem rekening elektronik khusus untuk

kelompok berpenghasilan rendah. “Untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan penyaluran bantuan sosial, pemerintah melalui BPNT.

Untuk melaksanakan BPNT, kita memerlukan kebijakan dan kerangka hukum berikut:

1. Undang – Undang Nomor .25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
2. Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
3. Undang-Undang Nomor .18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
5. PERPES Nomor .63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (BSNT)
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor. 20 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kerangka Hukum Untuk Penyaluran Bantuan Sosial

Kondisi Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Mencakup penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Yang di lakukan melalui e-warung. Setiap warga penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000 per bulan’. Selain itu, pemerintah desa juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Untuk mendukung warga yang mengalami Kemiskinan ekstrem dan kehilangan mata pencaharian. Program-Program ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat.

Tabel 1. Data Dusun Penerima Bantuan

No	Klasifikasi Dusun	Jumlah Orang
1	Kertasari	206
2	Sidaharja	154
3	Ciporoan	141

Sumber : Pemerintahan Desa Sidaharja 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Penerima Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis yang mendapatkan bantuan terdiri dari 3 Dusun yaitu Kertasari, Sidaharja, dan Ciporoan, dengan jumlah keseluruhan yaitu 501 orang dalam satu Desa. Pada awalnya, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Merupakan Program Pengganti Dari Program Beras Sejahtera (RASTRA) / Beras Miski (RASKIN) yang memiliki beberapa permasalahan. bahwa program pengganti rasta terdapat beberapa permasalahan yang kompleks yang dapat dilihat dari indikator tepat sasaran. yang dimana masih ditemukan *exclusion error* dan *inclusion error* yang tinggi. *exclusion* misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima rasta, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima rasta. sehingga masyarakat tidak dapat bantuan sosial rasata/raskin tersebut. sementara, *inclusion error* sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima rasta/raskin justru menerima bantuan tersebut.

Adapun Menurut Pedoman Umum BPNT (2018:10) Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Adalah Sebagai Berikut:

1. Mengurangi Beban Pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Melalui Pemenuhan Sebagai Kebutuhan Pangan.
2. Memberikan Gizi Yang Lebih Seimbang Kepada Keluarga Penerima manfaat (KPM).
3. Meningkatkan Ketepatan Sasaran Dan Waktu Penerimaan Bantuan Pangan Bagi Penerima Manfaat (KPM).
4. Memberi Pilihan Dan Kendali Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dalam Memenuhi Kebutuhan Pangan.
5. Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Keberlanjutan.

Namun pada kenyataanya berdasarkan hasil observasi awal terlihat bahwa Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari adanya indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Masih belum Tepat sasaran untuk penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terjadi karena Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik anatar Pelaksana dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), karena kurangnya kejelasan informasi dalam penyampaian Program BPNT.

2. Masih adanya tantangan Birokrasi dalam menjaga data penerima manfaat yang akurat dan terkini serta memastikan sinkronisasi data yang lancar antara berbagai lembaga pemerintahan dan lembaga keuangan yang terlibat dalam program Bantuan Pangan Non Tunai di desa sidaharja. Hal ini dapat menyebabkan penerima yang memenuhi syarat dikecualikan.
3. Masih terjadi keterlambatan dan kurangnya sarana dan prasarana bagi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Hal ini terjadi karena kurangnya sumber daya, termasuk sumber daya manusia, pendanaan, dan fasilitas di desa Sidaharja.

KAJIAN TEORITIS

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Secara umum pengertian implementasi adalah berasal dari bahasa Inggris "to implement" yang artinya mengimplementasikan. Tidak hanya sekedar aktifitas, implementasi juga merupakan sebuah kegiatan yang direncanakan serta dilakukan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Menurut Widodo (2012:88) berpendapat bahwa implementasi merupakan sesuatu proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta (individu atau kelompok). proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Secara umum implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan dalam bentuk tindakan. dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politisi karena wujudnya intervensi berbagai kepentingan. Menurut Nurdin (2022) Implementasi Kebijakan adalah tahapan kritis yang membutuhkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksanaan, dan struktur organisasi yang baik agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel (1980), Marilee S. Grindel (1980), dan

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), dan Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999).

Menurut George C Edwards III (Subarsono2023:90-92) ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja Implementasi, yaitu:

1. Komunikasi Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implemetor mngetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi dstorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Keberhasilan program keluarga berencana (KB) di Indonesia, sebagai contoh, salah satu penyebabnya adalah karena Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Secara intensif melakukan sosialisasi tujuan dan manfaat terhadap pasangan usa subur (PUS) Melalui berbagai media.
2. Sumber Daya Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjaln efektif. Sember daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia,yakni kompetensi implamentor, dan sumberdaya finansial.sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimilikioleh implementor, seperti komitmen,kejujran,sifat demokratis. Apabila implrmentor memiliki disposisi yang baik,maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakn. Ketika implementor memiliki sikap atau presepektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan ,maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagi pengalaman pembangunan di Negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah berbagai kasus korupsi yang muncul di Negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Birokrasi Struktur Birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Darwanto s.s (1992:19) “program merupakan suatu tampilan yang di buat dalam suatu acara agar acara tersebut dapat menarik para pendengar. Selanjutnya menurut Yulikuspartono (2009:290) “ program merupakan sederet intruksi atau berupa statement dalam bahasa yang di mengerti oleh computer yang bersangkutan”. Berdasarkan pendapat ahli diatas penulis menyimpulkan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan dan dapat dilakukan oleh semua orang, dan melalui program maka segala bentuk rencana lebih terorganisir dan lebih mudah untuk di oprasionalkan

Menurut Garvera (2022) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial dari pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan rentan. Bantuan ini diberikan secara non tunai melalui mekanisme transfer dana ke rekening penerima manfaat yang kemudian dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di *e-warong* atau toko yang telah bekerja sama dengan bank penyalur. Beberapa poin penting terkait pengertian BPNT menurut Garvera (Unigal):

1. Tujuan: Memenuhi kebutuhan pangan masyarakat miskin dan rentan.
2. Bentuk Bantuan: Non tunai, tidak diberikan langsung dalam bentuk uang tunai.
3. Mekanisme: Transfer dana ke rekening penerima manfaat.
4. Tempat Pembelian: E-warong atau toko yang telah bekerja sama dengan bank penyalur.

Dengan demikian, BPNT merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan memiliki akses terhadap bahan pangan yang berkualitas dan bergizi melalui sistem yang lebih terstruktur dan terkontrol.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Menurut pedoman umum BPNT (2018:11) Manfaat program pangan non tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan ditingkat keluarga penerima manfaat (KPM) Sekaligus sebagai mekanisme pelindung sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Dalam Agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

Adapun menurut pedoman umum BPNT (2018:1-12) prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Adalah sebagai berikut:

1. Mudah dijangkau dan di gunakan oleh keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Memberikan pilihan dan kendali kepada keluarga penerima Manfaat (KPM) Tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan-bahan (beras dan telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-warung tertentu dan bahan pangan tidak di paketkan).
3. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani keluarga penerima manfaat (KPM).
4. Transparansi dan kecerahan mekanisme penyaluran bantuan
5. E-warung dapat memberi pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternative pasokan yang lebih optimal. 6. Bank penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan.

Pendamping menjadi sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat . pendamping memiliki kedudukan sebagai mitra pemerintahan dan mitra masyarakat sehingga peran yang dimiliki menjadi salah satu cara untuk menjembatani berbagai kepentingan yang dibutuhkan pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Peran pendamping menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping adalah pekerjaan sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya. baik dalam segi

negosiasi, memberi dukungan, serta melakukan pengorganisasian dan pemanfaatan sumber.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai oleh Pendamping Keluarga Harapan di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual dan holistik melalui interaksi langsung dengan informan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan program dan dinamika sosial di lapangan. Wawancara dilakukan terhadap sejumlah informan kunci, seperti pendamping PKH, aparatur desa, dan keluarga penerima manfaat (KPM), guna memperoleh informasi yang relevan dan mendalam. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis seperti laporan kegiatan, data penerima bantuan, dan dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai oleh Pendamping Keluarga Harapan di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari George C. Edwards III yang mencakup empat dimensi utama: komunikasi, sumber

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Setiap dimensi dianalisis berdasarkan indikator-indikator yang disesuaikan dengan kondisi empirik di lapangan.

1. Komunikasi

Indikator komunikasi digunakan untuk menilai efektivitas penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat sasaran. komunikasi ini penting agar para pelaksana memahami dengan jelas tujuan, sasaran, dan mekanisme program sehingga dapat mengurangi distorsi dan miskomunikasi dalam pelaksanaan di lapangan. Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, indikator yang digunakan meliputi:

a) Pemberian Bantuan Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Belum Tepat Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara, mekanisme penentuan ketepatan sasaran bantuan di desa sidaharja melalui verifikasi dan validasi data calon penerima manfaat yang dilakukan oleh pendamping dan lembaga desa belum berjalan secara optimal karena masih ada Hambatan yang dihadapi yaitu ketidak jujuran beberapa KPM saat kunjungan rumah oleh dinas sosial. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan koordinasi intensif dan verifikasi berulang bersama pendamping agar data yang di peroleh akurat dan tepat sasaran. Penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui beberapa tahap, termasuk pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang mengacu pada data dari dukcapil. Verifikasi dan validasi dilakukan dengan mencocokkan NIK, nama, dan alamat calon penerima serta melibatkan pengawasan masyarakat melalui pengecekan mandiri di situs resmi atau aplikasi cek bansos. Meski terdapat hambatan teknis dan administrasi, upaya seperti verifikasi menyeluruh, sosialisasi intensif, dan koordinasi erat terus dilakukan agar penyaluran bantuan berjalan lancar.

Berdasarkan hasil observasi penulis, proses memastikan bantuan tepat sasaran seharusnya dilakukan survai langsung ke rumah calon penerima sebelum penyaluran bantuan oleh perangkat desa bersama pendamping. Hambatan yang muncul adalah ketidak tepat sasaran akibat petugas yang tidak melakukan kunjungan langsung ke rumah calon penerima. Oleh karena itu, diperlukan ketelitian lebih dari pemerintah desa dalam proses pemilihan penerima bantuan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak terjadi kesalahan distribusi. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka sesuai dengan teori menurut Anderson (Haryono,2002;143): berpendapat bahwa “

implementasi kebijakan esensinya berkaitan dengan aktifitas fungsional penyelenggaraan tujuan publik sehingga betul-betul mengenai pada sasaran". Berdasarkan teori diatas bahwasannya implementasi kebijakan esensinya berkaitan dengan aktifitas fungsional penyelenggaraan tujuan public sehingga betul-betul mengenai pada sasaran, sehingga kebijakan yang diimplementasikan harus benar-benar mengenai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, ketidak tepat sasaran pada penerima manfaat menunjukkan adanya kegagalan dalam proses implementasi kebijakan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, maupun komitmen pelaksanaan.

Dengan demikian penulis menganalisis dimensi komunikasi dengan indikator pemberian bantuan kepada KPM belum tepat sasaran belum berjalan optimal karena masih terdapat hambatan yaitu ketidak jujuran beberapa calon KPM saat kunjungan rumah oleh dinas sosial. Upaya yang harus dilakukan yaitu berkoordinasi secara intensif dan verifikasi berulang, pendamping bersama perangkat desa survai langsung ke lapangan agar data yang diperoleh akurat dan tepat sasaran

b) Terjadwalnya Bantuan Pangan Non Tunai Setiap Bulan

Berdasarkan hasil wawancara, sistem komunikasi dalam penyaluran bantuan biasanya dilakukan melalui surat dan group whatsapp yang di kelola oleh agen e-warung kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sudah berjalan secara optimal. Namun, tidak semua KPM, terutama lansia, memiliki handphone sehingga informasi terkadang tidak sampai kepada mereka. Untuk mengatasi hal ini, agen e-warung menjadwalkan penyaluran melalui group whatsapp dan jika ada KPM yang tidak hadir, informasi disampaikan kepada ketua PKH agar tetap tersampaikan dengan baik. Pendamping PKH juga aktif melakukan sosialisasi secara rinci mengenai program, jadwal, dan prosedur pengambilan bantuan serta memberikan dukungan langsung kepada KPM yang mengalami kendala.

Berdasarkan hasil observasi penulis, penyaluran bantuan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, daerah, dinas sosial, kecamatan, hingga bank penyalur, yaitu bank mandiri. Bank mandiri menghadirkan agenagen untuk membantu mempermudah akses KPM Terhadap pengambilan bantuan. Sosialisasi program secara aktif dilakukan agar informasi tersampaikan dengan baik. Namun, hambatan utama adalah keterbatasan fisik dan pemahaman KPM lansia terhadap jadwal dan prosedur pengambilan bantuan. Pendamping PKH berperan penting dalam memberikan

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

sosialisasi dan pendampingan agar bantuan dapat diterima dengan lancar meskipun terkadang penyaluran tidak tepat waktu.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi komunikasi dengan indikator terjadwalnya bantuan setiap bulan sudah berjalan optimal, karena penyaluran bantuan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dinas sosial, kecamatan, hingga bank penyalur yaitu bank mandiri dan bank mandiri menghadirkan agen-agen untuk membantu mempermudah akses KPM terhadap penyaluran bantuan. Dan petugas BPNT sudah mengomunikasi penyaluran bantuan yang dilakukan melalui surat dan group whatsapp yang dikelola oleh agen e-warung kepada ketua PKH dan diteruskan oleh ketua PKH ke group whatsapp KPM

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya digunakan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sumber daya yang esensial tersedia dan siap digunakan dalam pelaksanaan BPNT agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat sesuai target. Sumber Daya menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini, indikator yang digunakan meliputi:

- a) Adanya petugas yang kompeten dalam pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara, petugas yang terlibat dalam program BPNT sudah memiliki kompetensi yang memadai sudah berjalan optimal karena ditugaskan langsung oleh dinas sosial dan telah mendapatkan pelatihan serta sosialisasi mengenai regulasi, prosedur, dan teknis pelaksanaan program. Namun, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya pemahaman dari sebagian keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap Program BPNT. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi Hal-hal tersebut tersebut meliputi verifikasi dan validasi data secara berkala, monitoring langsung melalui kerjasama dengan e-warung, serta pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan secara rutin.

Berdasarkan hasil observasi penulis, petugas BPNT yang bertugas dilapangan telah dipersiapkan dengan baik sehingga siap menjalankan tugasnya. Hambatan yang muncul berasal dari kurangnya pemahaman sebagai KPM terhadap program, serta kendala teknis dalam proses penyaluran bantuan. Petugas berusaha memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, koordinasi antar

pihak,serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan program berjalan lancar dan KPM dapat menerima bantuan dengan baik.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi sumber daya dengan indikator adanya petugas yang kompeten dalam pelaksanaan program BPNT sudah optimal karena petugas BPNT sudah bertugas dengan baik dengan memberikan pelayanan yang optimal dengan melakukan sosialisasi, serta monitoring secara berkala agar pelaksanaan program berjalan lancar dan KPM dapat menerima bantuan dengan baik.

b) Adanya tempat yang memadai untuk pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara, para penerima manfaat (KPM) menyatakan bahwa fasilitas listrik, air bersih, dan jaringan internet dilokasi pelaksanaan BPNT di sidaharja sangat memadai dan mendukung kelancaran proses penyaluran bantuan sudah berjalan secara optimal. Mereka juga menyampaikan bahwa penyaluran BPNT berjalan lancar, dan agen e-warung yang tersedia sudah memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari segi lokasi,luas tempat, maupun aksesibilitas.

Berdasarkan hasil observasi penulis, fasilitas di desa sidaharja terkait listrik,air bersih, dan jaringan internet, sudah cukup baik dan tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan BPNT. Lokasi agen e-warung juga berada di pusat desa sehingga mudah dijangkau oleh KPM, mendukung kelancaran penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, fasilitas yang tersedia sudah memadai untuk mendukung proses distribusi BPNT dengan baik.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi sumberdaya dengan indikator adanya tempat yang memadai untuk pelaksanaan BPNT sudah berjalan optimal karena tidak ada hambatan bahwa fasilitas listrik, air bersih, dan jaringan internet dilokasi pelaksanaan BPNT di sidaharja sangat memadai dan mendukung proses kelancaran penyaluran bantuan, baik dari segi lokasi, luas tempat, maupun aksesibilitas bagi KPM.

c) tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara, tersedianya anggaran yang cukup untuk untuk pelaksanaan BPNT sudah berjalan optimal karena adanya Mekanisme yang jelas pada

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

penyaluran anggaran BPNT dimulai dari penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) oleh kementerian sosial berdasarkan data terpadu. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama bank himbara menyiapkan infrastruktur seperti pembentuka e-warung dan penyediaan perangkat EDC untuk transaksi. KPM melakukan registrasi dan membuka rekening KKS yang difasilitasi bank penyalur. Dana BPNT disalurkan kemensos melalui bank himbara ke rekening KPM, yang kemudian dapat di manfaatkan untuk membeli bahan pangan di e-warung. Proses ini berjalan relative lancar namun terkadang mengalami keterlambatan. meliputi gangguan teknis pada mesin EDC akibat sinyal, jika ada kenaikan harga pangan bias mengurangi jumlah bahan pangan yang di terima KPM. Upaya yang dilakukan agen e-warung untuk mengatsi hambtan tersebut dengan mengambil dari keuntungan agen dua ribu rupiah per KPM untuk akomodasi dan pembelian pulsa agar petugas dilapangan dapat merespon dengan cepat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, penyaluran dana BPNT melalui bank himbara ke agen e-warung berjalan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur, dimulai dari penetapan KPM hingga transaksi pembelian bahan pangan. Meskipun prosesnya relatif lancar, terdapat kendala seperti keterlambatan penyaluran dana dan gangguan teknis pada mesin EDC yang menghambat kelancaran transaksi. Selain itu, kenaikan harga pangan berdampak pada pengurangan jumlah bahan pangan yang di terima KPM. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh agen e-warung, seperti penggunaan biaya oprasional untuk komunikasi dan akomodasi petugas, menunjukkan adanya respon aktif terhadap hambatan yang muncul dalam peolaksanaan program.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi sumber daya dengan indikator tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan BPNT sudah berjalan secara optimal karena penyaluran dana BPNT melalui bank himbara ke agen e-warung berjalan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur dimulai dari penetapan KPM hingga transaksi pemberian bahan pangan, proses ini berjalan relatif lancar namun terkadang mengalami keterlambatan.

d) Adanya alat berupa kartu yang digunakan KPM untuk pelaksanaan program bantuan pangan non tunai.

Berdasarkan hasil wawancara, adanya alat berupa kartu untuk pelaksanaan program BPNT sudah berjalan optimal. karena proses pendistribusian kartu biasanya dilakukan langsung oleh petugas bank dan tidak mengalami hambatan karena kartu di

pegang oleh masing-masing KPM. Jika terjadi kehilangan, kerusakan, atau kartu tidak berfungsi, petugas desa berkoordinasi dengan Pendamping, TKSK, Dinas Sosial, dan pihak Bank untuk pergantian kartu melalui proses pembukaan rekening baru. Hambatan yang dulu muncul antara lain kesalahan data dalam namanya sama tapi niknya berbeda, ketidaktahuan jujuran KPM dalam penggunaan kartu, serta resiko penyalahgunaan karena pin kartu di temple di depan kartu tapi untuk sekarang berjalan lancar. Upaya yang dilakukan adalah pendampingan oleh petugas kepada KPM untuk mengganti kartu dan pelaporan masalah ke pihak bank agar segera ditindak lanjuti.

Berdasarkan hasil observasi penulis, distribusi kartu KPM di desa berjalan lancar dengan KPM mengambil kartu ke desa. Hambatan yang ditemui meliputi kesalahan data seperti pertukaran kartu akibat nama sama tapi alat berbeda, ketakutan KPM memegang kartu sendiri sehingga menyerahkan kepada keluarga yang berpotensi penyalahgunaan, serta resiko keamanan karena PIN yang di temple di depan kartu. Penanganan hambatan ini dilakukan dengan mengedukasi KPM agar melapor ke pendamping atau agen e-warung jika kartu hilang atau rusak sehingga penggantian kartu bias dilakukan dengan cepat oleh pihak bank

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi sumber daya dengan indikator adanya kartu yang digunakan KPM untuk pelaksanaan BPNT sudah berjalan secara optimal, karena proses pendistribusian langsung oleh petugas bank dan tidak mengalami hambatan karena kartu dipegang oleh masing-masing KPM dan pendistribusian kartu di desa berjalan lancar dengan system pengambilan fleksibel ada yang diambil ke desa oleh KPM dan untuk lansia kartu diantarkan ke rumah oleh perangkat desa.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

3. Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Indikator pada dimensi ini meliputi:

- a) Pelaksanaan program bantuan pangan non tunai dilakukan secara cepat dan akredibel

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan penyaluran program BPNT dilakukan secara cepat dan akredibel sudah berjalan secara optimal karena adanya mekanisme yang jelas dalam penyaluran program yaitu penyaluran dana BPNT dilakukan oleh bank himbara yang mentransfer langsung ke rekening KPM, kemudian pencairan dilakukan di agen e-warung. terkadang ada kendala di masalah teknis seperti sinyal buruk dan mesin EDC yang bermasalah. kendala administrasi muncul akibat data KPM yang tidak sinkron antara data kemensos, disdukcapil, dan SIKS-NG, sehingga mempengaruhi proses pencairan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut meliputi verifikasi dan validasi data secara berkala, sosialisasi intensif kepada KPM, serta peningkatan kualitas infrastruktur.

Berdasarkan hasil observasi penulis, mekanisme pelaksanaan BPNT dimulai dari penetapan KPM oleh Kemensos berdasarkan data terpadu, diikuti oleh penyiapan infrastruktur oleh pemerintah daerah bersama bank himbara. registrasi berkoordinasi antara pemda, pendamping PKH, dan bank himbara. hambatan teknis dan administrasi menghambat kecepatan pelaksanaan program. upaya perbaikan dilakukan dengan meningkatkan infrastruktur, memperbaiki proses verifikasi data, dan melakukan sosialisasi agar KPM memahami prosedur bantuan, pemantauan dari waktu ke waktu dilakukan oleh petugas dan pendamping untuk memastikan kelancaran penyaluran dana.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi disposisi dengan indikator pelaksanaan program BPNT yang dilakukan secara cepat dan akredibel sudah berjalan optimal karena penyaluran BPNT dilakukan oleh bank himbara yang mentransfer langsung ke rekening KPM, kemudian pencairan dilakukan di agen e-warung dan mekanisme pelaksanaan BPNT dimulai dari penetapan KPM oleh Kemensos berdasarkan data terpadu diikuti oleh penyiapan infrastruktur oleh pemerintah daerah bersama bank himbara.

b) Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di lakukan secara transparan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan BPNT dilakukan secara transparan sudah optimal.karena adanya pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima BPNT dilakukan setiap tahun melalui musyawarah desa. Namun,adanya ketidak jujuran dari sebagian KPM saat verifikasi dan validasi data, Pemerintah desa bersama pendamping dan TKSK yang ditugaskan oleh dinas sosial berupaya mengatasi hambatan ini dengan koordinasi langsung dan menindak lanjuti pengaduan masyarakat.hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk menjalankan program secara transparan dan efektif demi kesejahteraan penerima manfaat.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pemantauan dan evaluasi BPNT dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan. Meskipun terdapat hambatan berupa ketidakjujuran KPM saat proses pendataan, dan TKSK sangat penting dalam menyelesaikan masalah yang muncul. Selain itu, kesadaran KPM mengenai mekanisme pemantauan dan evaluasi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih efektif dan transparan.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi disposisi dengan indikator pelaksanaan program BPNT dilakukan secara transparan sudah terlaksana secara optimal karena pelaksanaan verifikasi dan validasi penerima BPNT dilakukan setiap tahun melalui musyawarah desa. Denga pemantauan dan evaluasi BPNT dilakukan secara berkala untuk memastikan program berjalan dengan baik dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan perbaikan berkelanjutan untuk menjalankan program secara transparan dan efektif demi kesejahteraan penerima manfaat.

4. Struktur Birokrasi

Indikator struktur birokrasi digunakan untuk memastikan adanya mekanisme, prosedur, dan organisasi yang efektif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Sehingga koordinasi antar pelaksana, pengguna sumber daya yang optimal, dan pelaksanaan prosedur yang tepat sehingga penyaluran bantuan berjalan lancar. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan sangat menentukan efektivitas operasional program. Indikator yang dianalisis mencakup:

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

- a) Adanya mekanisme yang jelas pada pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT)

Berdasarkan hasil wawancara, adanya mekanisme yang jelas pada pelaksanaan program BPNT sudah berjalan secara optimal. Karena adanya koordinasi yang rutin dan terstruktur antar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT. Itu sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan ketepatan penyaluran bantuan. Adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menemukan solusi atas kendala yang ada. Peran pendamping dan pemerintah desa juga krusial dalam mendukung mekanisme koordinasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis, koordinasi antara pihak masih menghadapi kendala terutama dalam penyampaian informasi yang efektif kepada KPM, khususnya jika mengandalkan komunikasi lewat handphone yang tidak selalu sampai. Hal ini menyebabkan perlunya kunjungan langsung kerumah KPM, yang menimbulkan biaya dan waktu tambahan. Selain itu, kurangnya pemahaman mekanisme koordinasi antar tingkat pemerintah (kecamatan dan desa) juga menjadi hambatan. Oleh karena itu, peningkatan efektifitas proses verifikasi dan validasi data serta perbaikan komunikasi antar pihak sangat di perlukan agar bantuan lebih tepat sasaran dan proses penyaluran berjalan lebih lancar.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi struktur birokrasi dengan indikator adanya mekanisme yang jelas pada pelaksanaan BPNT sudah terlaksana secara optimal karena adanya koordinasi terkait rencana saat penyaluran atau pun saat monitoring dan evaluasi pelaksanaan untuk menyamakan persepsi dan memudahkan dalam ketepatan menyampaikan dengan semua yang berperan dalam penyaluran BPNT.

- b) Petugas pelaksanaan program bantuan pangan non tunai (BPNT) bersikap responsive dalam memberikan pelayanan terhadap keluarga penerima manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil wawancara, petugas pelaksana program BPNT sudah berjalan optimal karena adanya pelayanan yang baik dari petugas BPNT kepada keluarga penerima manfaat dan adanya Upaya yang dilakukan petugas dan agen e-warung yaitu dengan meningkatkan koordinasi intensif dengan dinas sosial, pendamping PKH, pemerintah desa, serta melakukan verifikasi Sosialisasi yang efektif dan pemutakhiran

data secara berkala juga menjadi strategi penting untuk meminimalisir kesalahan data. Pelayanan kepada KPM oleh petugas BPNT dinilai sudah baik, meskipun evaluasi kinerja petugas masih kurang diketahui oleh KPM.

Berdasarkan hasil observasi penulis, bahwa koordinasi yang rutin antar petugas ditingkat kecamatan dan kabupaten serta pemerintah desa sangat penting untuk pengawasan dan monitoring penyaluran bantuan tim SOS pangan secara berkala memantau proses registrasi, penyaluran saldo, dan penggunaan bantuan oleh KPM. Meski terdapat hambatan teknis dan administrasi seperti keterlambatan saldo, dan kesalahan data, upaya pengawasan, evaluasi, dan rekomendasi terus dilakukan untuk menyempurnakan program. Pelayanan di e-warung berjalan sesuai prosedur dengan penggunaan mesin EDC dan penyediaan bahan pangan yang sesuai. Secara keseluruhan, upaya koordinasi, verifikasi, sosialisasi, dan monitoring menjadi kunci keberhasilan program BPNT dan PKH agar manfaatnya tepat sasaran dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang berhak.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimensi struktur birokrasi dengan indikator petugas pelaksana BPNT bersikap responsive dalam memberikan pelayanan yang baik kepada KPM sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan KPM dan jika ada kendala pada KPM petugas siap membantu dengan cepat.

c) Adanya komunikasi terkait waktu penyaluran antara agen e-warung dan keluarga penerima manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil wawancara, adanya komunikasi antara agen e-warung dengan KPM sudah berjalan secara optimal. Karena adanya komunikasi antara agen e-warung yang mengomunikasikan jadwal penyaluran melalui group whatsapp dan media sosial lainnya. agen e-warung juga berupaya menyampaikan informasi kepada ketua Rt/Rw, dan kepala dusun agar dapat diteruskan secara langsung kepada KPM yang belum menerima informasi. Selain itu, agen juga membuat status di whatsapp dan menghubungi ketua PKH secara langsung untuk memastikan semua KPM mendapat informasi.

Berdasarkan hasil observasi penulis, komunikasi jadwal penyaluran oleh agen e-warung memang sangat bergantung pada media sosial seperti whatsapp. Namun, terdapat kendala bagi KPM yang tidak memiliki handphone atau keterbatasan secara

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

fisik sehingga sulit menerima informasi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan melibatkan ketua PKH yang kemudian mendatangi langsung rumah KPM yang belum mengambil bantuan. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara agen e-wrung dan ketua PKH untuk memastikan semua KPM mendapatkan informasi dan bantuan tepat waktu.

Dengan demikian penulis menganalisis bahwa dimenstruktur birokrasi dengan indikator adanya komunikasi terkait waktu penyaluran antara agen e-warung dan KPM sudah terlaksana secara optimal. Karena agen e-warung biasanya mengomunikasikan jadwal penyaluran melalui group whatsapp dan status whatsapp, dan menghubungi ketua PKH secara langsung untuk memastikan semua KPM mendapat informasi. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antara agen e-warung dengan KPM untuk memastikan semua KPM mendapat informasi dan bantuan tepat waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari judul “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.” dapat diketahui keseluruhan dari penelitian ini adalah belum berjalan dengan optimal. Dibuktikan dengan masih adanya dimensi dan indikator yang belum terpenuhi yaitu dimensi komunikasi Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dari dimensi komunikasi ada yang belum optimal yaitu pada indikator pemberian bantuan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) belum tepat sasaran karena: Kurangnya survei langsung ke lapangan dari pemerintah desa dan pendamping PKH, Ketidak jujuran KPM saat verifikasi dan validasi/pada saat di home visit oleh dinas sosial, Kurangnya koordinasi Antar pihak terkait dalam penyaluran.

Adapun hambatan yang dihadapi oleh pendamping PKH dalam Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis. Menghadapi berbagai hambatan teknis, administrasi, dan koordinasi saat pelaksanaan BPNT, kurangnya koordinasi antara pihak terkait serta kurangnya pemahaman beberapa keluarga penerima manfaat (KPM) terhadap mekanisme dan prosedur BPNT. Selain itu, kendala teknis juga muncul, seperti sinyal jaringan yang kurang stabil dan masalah pada perangkat

elektronik (EDC) untuk transaksi di agen penyalur, Hambatan administrasi berupa ketidak sesuaian dan ketidak lengkapan data KPM pada system data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), Disdukcapil, dan SIKS-NG menyebabkan terhambatnya proses pencairan bantuan yang tepat waktu.

Adapun upaya yang dilakukan pendamping keluarga harapan dalam implementasi program bantuan pangan non tunai oleh pendamping keluarga harapan di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis yaitu: melakukan sosialisasi intensif secara langsung kepada KPM, termasuk menjelaskan secara rinci tentang program, jadwal penyaluran, serta tata cara pengambilan bantuan agar KPM lebih paham dan tidak khawatir menghadapi kendala, Pendamping juga aktif melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala untuk memastikan data KPM akurat dan sinkron dengan DTKS dan data kependudukan, sehingga penerima bantuan tepat sasaran, Koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah desa, Dinas Sosial, Kecamatan, Bank Mandiri, sebagai bank penyalur di kabupaten ciamis, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki proses penyaluran. Selain itu, pendamping membantu KPM yang mengalami masalah seperti kehilangan atau kerusakan kartu KKS dengan proses penggantian yang difasilitasi.

Dimensi komunikasi yang belum optimal yaitu pada indikator pemberian bantuan kepada keluarga penerima manfaat belum tepat sasaran, maka dari itu penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya Pemerintah desa bersama pendamping PKH harus melakukan survey langsung ke rumah calon keluarga penerima manfaat (KPM) untuk memastikan layak atau tidaknya mendapat bantuan.
2. Tingkatkan sosialisasi dan edukasi kepada KPM mengenai Program BPNT dan pentingnya kejujuran dalam memberikan data, serta konsekuensi jika terdapat ketidak jujuran dari calon keluarga penerima manfaat.
3. Tingkatkan komunikasi antar pihak terkait melalui pertemuan rutin dan penggunaan platform komunikasi yang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. Terima kasih disampaikan kepada Pemerintah Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican,

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Oleh Pendamping Keluarga Harapan Di Desa Sidaharja Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis

Kabupaten Ciamis, serta para Pendamping Keluarga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan informasi penting dalam proses pengumpulan data.

Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis, khususnya kepada dosen pembimbing, R. Rindu Garvera dan Asep Nurdin Rosihan Anwar, atas arahan, bimbingan, dan motivasi yang sangat berarti selama proses penyusunan artikel ini.

Tak lupa, penulis juga mengapresiasi dukungan dari rekan-rekan mahasiswa serta keluarga yang telah memberikan semangat dan doa sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi dalam peningkatan efektivitas program bantuan sosial di tingkat desa.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, S (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Alfabeta. Bandung.
- Moleong, L.J (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama Subarsono,
- Ag (2023). *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, Dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sugiyono (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Jurnal

- Annafa'ah, S., & Rahaju, T. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA JEGULO KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN Siti Annafa'ah Abstrak. *Jurnal Publika*, 7(8), 2439. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/31619/28685>. (diakses 20 April 2021)
- Djaenal, R., Kaawoan, J. E., & Rachman, I. (2021). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam 112 Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore. *Governance*, 1(2)
- Fanny, N. R. F., & Megawati, S. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. *Publika*, 407-418.
- Fauzi, Nindya Febrianti; Supena, H.; Hidayat, Eet Saeful. *Implementasi Program Odf*

- Haji, B. T. (2020). Pengertian Implementasi. LAPORAN AKHIR, 31
- Kholif, K. I. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Nabila, K., Suharso, P., & Hartanto, W. (2021). Implementasi program bantuan pangan non tunai (bpnt) di desa paleran kecamatan umbulsari kabupaten jember. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 15(2), 303-309.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran pendamping dalam pemberdayaan masyarakat miskin melalui program keluarga harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 161-169.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95. 113
- Sabarisman, M. (2019). Peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pangan. *Sosio Informa*, 5(2).
- Amelia, L., Vestikowati, E., & Garvera, R. R. (2022). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Masyarakat di Desa Hanum Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap Jawa Tengah.
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25-36.
- Firmansyah, N., Garis, R. R., & Anwar, A. N. R. (2023). Implementasi Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi Dan Jaringan Oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Ciamis. *Journal Education and Government Wiyata*, 1(3), 143-154.

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 13. Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor.18 Tahun 2012 Tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 114
- PERPRES Nomor. 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai(BPNT)
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kerangka Hukum Untuk Penyaluran Bantuan Sosial